

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2003-2012**

Oleh :
Andreas Marzel Pelealu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : andre.marzel@yahoo.com

ABSTRAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah. Adanya DAK dan PAD menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk sebaik mungkin dalam penggunaan kedua dana tersebut, dalam merealisasikannya lewat pembangunan yang bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat di daerah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja modal pemerintah Kota Manado Tahun 2003 – 2012. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Ekonometrika dengan fungsi regresi linear berganda dengan Metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Kata kunci: *dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan belanja modal*

ABSTRACT

Special Allocation Fund and Revenue are sources of local revenue. The DAK and PAD causing the local government claimed to the best possible use of both these funds, in make it possible through a beneficial development and provide satisfaction for the people in the area. This study aimed to determine the effect of the DAK and PAD for Capital Expenditure the government in Manado City in 2003-2012. The model of analysis used in the research is Econometrics Analysis with the function of multiple linear regression with Ordinary Least Square method (OLS). The result showed that the DAK and PAD is positive and significant effect to the capital expenditure in the government of the Manado City.

Keywords: *special allocation fund, revenue, and capital expenditure*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah Daerah sendiri juga memiliki otonomi yang luas dalam mengurus dan mengelola sumber-sumber perekonomian daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penciptaan terhadap kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan sebelumnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengeluaran transfer ke daerah berupa subsidi daerah otonom dan anggaran bantuan pembangunan pusat dalam bentuk instruksi presiden BPS Sulut (2011).

Kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dijadikan dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu melalui sektor PAD. Pemerintah Kota Manado sendiri terus berupaya untuk mengelola potensi pemasukan keuangan daerah melalui sumber-sumber penerimaan daerah. Karena dengan adanya kegiatan pembangunan di daerah hal tersebut harus didukung oleh anggaran yang tersedia di daerah. Pada Tabel 1 dapat dilihat perkembangan PAD Kota Manado sebagai berikut :

**Tabel 1. PAD Kota Manado
Tahun 2003-2012 (Miliar Rupiah)**

| Tahun | Realisasi |
|-------|-----------------|
| 2003 | 30.392.108.218 |
| 2004 | 32.995.360.000 |
| 2005 | 38.375.877.000 |
| 2006 | 46.516.790.000 |
| 2007 | 54.715.562.000 |
| 2008 | 73.898.733.040 |
| 2009 | 72.404.996.767 |
| 2010 | 90.828.438.199 |
| 2011 | 134.721.721.000 |
| 2012 | 149.019.000.000 |

Sumber : BPS Sulut (Manado dalam angka 2003-2011)
dan www.depkeu.go.id

Tabel 1 dapat dilihat perkembangan PAD Kota Manado dari tahun 2003 sampai 2012 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 30.392.108.218 di tahun 2003 dan Rp. 149.019.000.000 di tahun 2012. Walaupun di tahun 2009 PAD Kota Manado mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2008 sebesar Rp. 73.898.733.040 sedangkan di tahun 2009 turun menjadi Rp. 72.404.996.767 namun di tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 90.828.438.199. Hal ini berarti, pemerintah Kota Manado mampu mengelola dan merealisasikan potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang nantinya membiayai pembangunan daerah. Dengan

meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Pemberian pendelegasian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk dana pemerimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan dana alokasi khusus. Dalam pemanfaatan dana alokasi khusus pemerintah mengarahkan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana fisik. Tentunya demi meningkatkan dan menunjang pelayanan publik yang lebih baik lagi. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah asset tepat yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik Nugroho (2010:4).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Darise (2009:48) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber PAD terdiri dari :

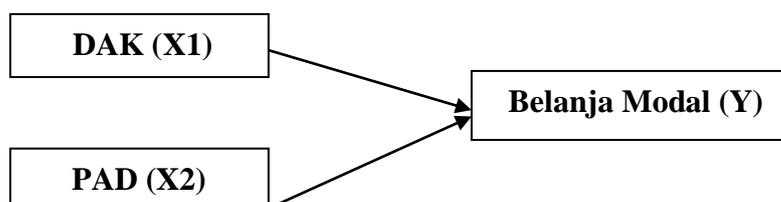
- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja Modal

PP Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Kerangka Pemikiran

Terjadi hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga berpengaruh terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder DAK, PAD dan Belanja Modal tahun 2003-2012 (tahunan) data *time series*. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, media internet, jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Model Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika, yaitu model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square*). Penaksiran OLS merupakan penaksiran tak bias linear yang terbaik (best linear unbiased estimator/BLUE). Fungsi persamaan umum yang akan diestimasi dalam penelitian ini Suliyanto (2011:54) adalah :

$$BM = f(\text{DAK}, \text{PAD}) \dots\dots\dots(3.1)$$

Kemudian persamaan (3.1) dapat dituliskan kedalam model dasar regresi berganda :

$$BM = \beta_0 + \beta_1 \text{DAK} + \beta_2 \text{PAD} + \mu_i \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana :

BM = Belanja modal (Rp. Milyar)

DAK = Dana alokasi khusus (Rp. Milyar)

PAD = Pendapatan asli daerah (Rp. Milyar)

β_0 = Konstanta

μ_i = *Error Term*

β_1, β_2 = Parameter yang akan ditaksir memperoleh gambaran tentang besarnya pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Data belanja modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai realisasi belanja modal Kota Manado yang nilainya dinyatakan dalam miliar Rupiah.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data dana alokasi khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai realisasi dana alokasi khusus Kota Manado yang nilainya dinyatakan dalam miliar Rupiah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data PAD yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah Kota Manado yang nilainya dinyatakan dalam miliar Rupiah.

Pengujian Statistik (*Goodnes Of Fit*)

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan model masuk dalam kategori cocok (*fit*)

dengan σ^2 . Inilah yang disebut asumsi *heteroskedasticity* atau varian yang sama, dengan menggunakan *White Test* Suliyanto (2011:95).

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau *time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *cross-sectional data*) Sumodiningrat (2007:231). Pada penelitian ini digunakan metode pengujian *Lagrange Multiplier* atau uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM-Test*.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar dua variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier Suliyanto (2011:85).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Model

Hasil regresi antar variabel bebas (DAK, PAD), dan variabel terikat (belanja modal) menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS, Sulut dari tahun 2003-2012. Data sekunder tersebut diestimasi dengan analisis regresi berganda seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program Eviews 7.0 untuk uji t, uji F, uji R^2 sampai dengan uji asumsi klasik. Dari hasil regresi dapat dibentuk model estimasi sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Estimasi (OLS) Pengaruh DAK, PAD terhadap Belanja Modal

| | | | | |
|------------------|---|------------|------------------|------------------------|
| BM | = | 4910082. | + 2.154647DAK*** | + 0.427392PAD** |
| S β | = | (0, 3996) | | (0, 0,1468) |
| t-statistik | = | (5.391258) | | (2.593352) |
| $R^2 = 0.935489$ | | R= 0,96 | | F-Statistik = 50.75413 |

Sumber : Data diolah, 2013

Ket : *** Signifikan pada $\alpha = 1\%$

** Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Hasil regresi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas yaitu DAK, dan PAD terhadap belanja modal sebagai berikut: (1) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi DAK yaitu sebesar (2.154647). Artinya setiap kenaikan DAK sebesar 1 miliar maka belanja modal akan naik sebesar 2.154.000.000 ceteris paribus. (2) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi PAD yaitu sebesar (0.427392). Artinya setiap kenaikan PAD sebesar 1 miliar maka belanja modal akan naik sebesar 427.000.000 ceteris paribus.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel pada derajat kebebasan (n-k-1) dan tingkat signifikansi (α) 1%, 5%, 10%.

Nilai F-tabel dengan derajat kebebasan (0,01) dan $\alpha = 1\%$ adalah 9.55. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 50.75413. Dengan demikian F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, artinya secara bersama-sama variabel DAK, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji secara individual (Uji t)

1. Uji t terhadap Koefisien α_1 dari DAK

- Df = n-k
= 10-3
= 7
- α = 1%
- T-tabel = 2.988
- T-hitung = 5.391258
- Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (5.391258 > 2.988). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan ditolaknya H_0 , maka perubahan DAK mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% ($\alpha = 1\%$) terhadap belanja modal.

2. Uji t terhadap Koefisien α_2 dari PAD

- Df = n-k
= 10-3
= 7
- α = 5%
- T-tabel = 1.895
- T-hitung = 2.593352
- Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (2.593352 > 1.895). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dengan ditolaknya H_0 , maka perubahan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) terhadap belanja modal.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil regresi diketahui bahwa nilai R^2 adalah 0.935489 = 93,54% yang berarti bahwa kontribusi atau sumbangan dari variabel bebas DAK, PAD secara bersama-sama terhadap variasi naik turunnya variabel belanja modal adalah sebesar 93,54% , sisanya 6,64% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam model.

Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi dilakukan untuk mengukur keeratan hubungan linear antara variabel Y dan X. jika nilai $R^2 = 0,935489$ maka $R = \sqrt{0,935489} = 0,967206$ (96%). Jadi hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas adalah sebesar 96%. Hal ini berarti terdapat hubungan yang erat sekali dan positif antara DAK, PAD dengan belanja modal.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| |
|--|
| $R^2 = 0.301216$ |
| Obs* R-squared = 3.012160 |
| Chi-squares (X^2) pada α 1% = 15.0863 |

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 3 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.301216. Nilai *Chi-squares* hitung sebesar 3.012160 yang diperoleh dari informasi *Obs* R-squared* (jumlah observasi dikalikan dengan (R^2)). Di lain pihak, nilai kritis Nilai *Chi-squares* (X^2) pada $\alpha = 1\%$ dengan df sebesar 5 adalah 15.0863. Karena nilai *Chi-squares* hitung (X^2) lebih kecil dari nilai kritis *Chi-squares* (X^2) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi**Tabel 4. Uji Autokorelasi**

| |
|--|
| $R^2 = 0.378194$ |
| chi-squares (X^2) = 3.781944 |
| nilai kritis (X^2) pada α 10% = 4.60517 |
| nilai kritis (X^2) pada α 5% = 5.99147 |
| nilai kritis (X^2) pada α 1% = 9.21034 |

Sumber: Data diolah, 2013

Hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.378194. Nilai *Chi-squares* hitung (X^2), sebesar 3.781944 sedangkan nilai kritis (X^2) pada $\alpha = 10\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 1\%$ dengan df sebesar 2. Karena nilai *Chi-squares* hitung (X^2) lebih kecil dari pada nilai kritis *Chi-squares* (X^2), maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Multikolinieritas**Tabel 5. Uji Multikolinieritas**

| Variabel | R^2 Hitung | R^2 |
|----------|--------------|----------|
| PAD | 0.460475 | 0.935489 |

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 5 menunjukkan hasil analisis uji multikolinieritas terlihat bahwa R^2 statistik lebih kecil dari R^2 model utama. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan diterimanya H_0 berarti tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Pembahasan

Pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, pemerintah daerah diharapkan mampu mengali potensi-potensi atau sumberdaya-sumberdaya yang ada di daerah sendiri yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yang tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan publik. Dana alokasi khusus merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat ini dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Pemerintah daerah pun harus sebaik mungkin mengelola dana tersebut demi pembiayaan pengeluaran daerah. Dengan pemanfaatan DAK yang optimal dan dengan sesuai sasaran, itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Situngkir (2009:68) dimana dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerah sendiri sebagai penerimaan daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri. Memaksimalkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang akan membiayai pengeluaran pemerintah daerah lewat belanja modal, akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah yang nantinya akan menambah pendapatan asli daerah. Dengan begitu peningkatan investasi modal diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Darwanto (2007:12) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan begitu pengeluaran pemerintah lewat belanja modal melalui pembangunan di berbagai sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

PENUTUP
Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado. (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan anggaran yang memiliki kontribusi terbesar terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah pemerintah Kota Manado tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap belanja modal.

Saran

Saran yang disampaikan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah daerah harus benar-benar mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi di daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga dengan kemandirian daerah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah sendiri demi kepentingan masyarakat melalui pembangunan pelayanan publik. Yang nantinya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi.
- 2) Pemerintah daerah harus mengefisienkan dan mengoptimalkan kinerja para pegawainya serta meningkatkan kualitas para pegawainya dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang. Karena dengan begitu pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang merupakan pengeluaran terbesar pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Manado dalam Angka*, Berbagai Edisi. Sulawesi Utara
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin. Makassar.* <http://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/aspp04.pdf>
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi kedua. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika* Jilid 1 dan 2. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal : Studi Kasus pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/26411/1/skripsi.pdf>
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. *Tesis.* Fakultas Ekonomi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3984/1/09E01911.pdf>
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sumodiningrat. 2007. *Ekonometrika Pengantar*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.* Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.* Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,* Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.